

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme yang digunakan oleh negara dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memilih orang-orang yang akan berada dalam pemerintahan. Di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih seorang presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif yang diantaranya adalah DPR, DPD, dan DPRD.

Pada tahun 2019, sistem pelaksanaan Pemilu mengalami perubahan. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu kali ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu butir ketentuan dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilakukan secara serentak. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yang mana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 secara serentak adalah pengalaman baru bagi demokrasi elektoral Indonesia, kendatipun isu Pemilu serentak pernah terjadi yakni pada Pemilu Lampung tahun 2014. Tahun 2014 Provinsi Lampung menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berbarengan dengan Pemilu Legislatif. Masyarakat Lampung yang telah menjadi pemilih mendapat 5 kertas suara yakni Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta Pemilu gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan pengalaman tersebut penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat belajar mengenai dinamika dan dampak yang terjadi pada Pemilu serentak.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi yang mana memberikan kesempatan untuk rakyat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Demokrasi dalam pemerintahan adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan-tujuan kepentingan rakyat (Becker & Raveloson, 2008). Di dalam

menjalankan pemerintahan, rakyat memberikan mandat kepada wakil terpilih (*elected representative*) untuk membentuk hukum, peraturan, regulasi, dan semacamnya serta menjalankan fungsi pemerintahan dalam periode waktu tertentu (Sardini, 2021). Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai bentuk kegiatan dari warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Bentuk dari partisipasi politik bisa bersifat individual atau kelompok, legal atau ilegal, terstruktur atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, serta efektif atau tidak efektif (Huntington & Nelson, 1994). Dalam Pemilu, partisipasi politik diwujudkan dalam penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada hari H pemungutan suara.

Berdasarkan data KPU RI dinyatakan bahwa tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 mencapai angka 81%. Hal ini melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 77,5%. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2019 tersebut sebesar 80,1%. Pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat lima daerah yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi diantaranya yakni: Kabupaten Magelang dengan persentase 85,9%, Kabupaten Temanggung dengan persentase 87,67%, Kabupaten Rembang dengan persentase 88%. Kota Salatiga dengan persentase 87,9% dan Kota Magelang 87,2%. Tingkat partisipasi tersebut sangat meningkat dari Pemilu sebelumnya, khususnya untuk Kota Magelang yang pada Pemilu sebelumnya yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 tingkat partisipasi hanya 76%.

Kota Magelang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas sekitar 18,5364 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 121.872 jiwa dan tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, dan Kecamatan Magelang Tengah. Pada Pemilu tahun 2019 ini Daftar Pemilih Tetap Kota Magelang berjumlah 95.408 pemilih. Dari total DPT yang ada pengguna hak pilih berjumlah 82.198 pemilih atau berkisar pada 87,2%. Presentase ini menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya yang hanya berkisar di angka 75%.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu

Pemilu	DPT	Pengguna Hak Pilih	Presentase
Pilpres 2014	94.418	75.585	80%
Pilwalkot 2015	90.210	67.792	75%
Pilgub 2018	90.546	68.910	76%
Pilpres 2019	95.408	82.198	87%

Sumber: KPU Kota Magelang, 2019

Berdasarkan data di atas, pada setiap pelaksanaan pemilu presiden tingkat partisipasi pemilih menunjukkan presentase yang tinggi yaitu berada diangkat 80% lebih. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan pemilu gubernur dan walikota yang hanya memiliki persentase 75%. Salah satu contoh wilayah di Kota Magelang yang memiliki tingkat partisipasi tinggi adalah Kecamatan Magelang Utara. Jumlah penduduk di Kecamatan ini sekitar 30,05% dari total penduduk Kota Magelang atau sekitar 36.622 penduduk yang tersebar di 5 kelurahan yakni Kecamatan ini memiliki 5 kelurahan diantaranya yaitu Kelurahan Kramat Selatan, Kramat Utara, Wates, Kedungsari, dan Potrobangsari. Total DPT berjumlah 27.984 jiwa. Dari total DPT tersebut, Kecamatan Magelang Utara mampu meraih tingkat

partisipasi pemilih sebesar 87,5% dengan tingkat penggunaan hak memilih atau suara sah yaitu mencapai 98%.

Penyerentakan Pemilu tahun 2019 memiliki dampak positif antara lain tercapainya efisiensi anggaran terutama pos honorarium petugas badan *ad hoc* Pemilu (Sardini, 2017:3) dan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari digabungkannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif, sehingga memunculkan efek ekor jas atau lebih sering disebut *coattail effect*. Kemunculan efek tersebut berasal dari popularitas figur calon presiden dan figur calon wakil presiden dan bekerja disaat pemilih memilih secara berurutan dan disaat pemilu diselenggarakan serentak lebih banyak pemilih yang memutuskan kandidat lokal terlebih dahulu sebelum memilih daftar partai (Rheault et al., 2020).

Pada Pemilu presiden tahun 2019 masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang sama dengan Pemilu presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Bedanya, kali ini Jokowi sapaan akrab dari Joko Widodo maju bersama KH Ma'ruf Amin, sedangkan Prabowo Subianto maju bersama Sandiaga Uno. Salah satu lembaga survey terkemuka di Indonesia yaitu Charta Politika merilis hasil survey yang dilakukan pada 1-9 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Pengenalan dan Elektabilitas Pasangan Calon Dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pasangan Calon	Pengenalan	Elektabilitas
Pasangan Calon No Urut 1		
Joko Widodo	98.8%	53.6%
KH Ma'ruf Amin	89.5%	
Pasangan Calon No Urut 2		
Prabowo Subianto	94.9%	35.4%
Sandiaga Uno	85.1%	

Sumber: Lembaga Survey Charta Politika

Menurut survey yang dilakukan oleh lembaga tersebut tingkat pengenalan masyarakat terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto sangat tinggi yang mencapai 94% keatas. Angka persentase tersebut tak lepas dari efek Pemilu tahun 2014 yang mempertemukan dua kandidat presiden tersebut sehingga masyarakat telah mengenal dengan baik nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk kontestasi Pemilu tahun 2019 kali ini. Selain itu, tingkat pengenalan masyarakat terhadap calon presiden juga dipengaruhi oleh pemberitaan media sosial seperti twitter, instagram, whatsapp; pemberitaan media televisi; serta dari isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di era modernisasi, kampanye politik di media massa memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih (Utomo, 2013).

Peran media massa ini dalam penyelenggaraan Pemilu sangat penting karena media massa adalah sumber penyebaran informasi yang mampu menjangkau pemilih secara luas. Intensitas pemilih dalam melihat berita-berita terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden di media massa akan meningkatkan pemahamannya terhadap calon yang maju, sehingga pemilih akan

mengetahui mana calon yang tepat untuk didukung. Untuk mengusahakan terpilihnya calon didukung maka muncul dorongan bagi pemilih untuk hadir dalam Pemilu dengan tujuan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Bukan hanya itu, intensitas pemilih dalam melihat berita-berita terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden juga memiliki imbas pada penilaian terhadap partai pengusung calon. Menurut Charta Politika terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya terkait pilihan partai, yaitu:

Tabel 1.3
Alasan Memilih Partai Politik

Alasan Memilih	Persentase
Karena mengusung calon Presiden - Wakil Presiden yang saya sukai	16.8%
Sudah terbiasa memilih partai tersebut	11.6%
Adanya tokoh tertentu yang berhubungan dengan partai	9.7%
Memperjuangkan Kepentingan Umat Islam	7.3%
Mewakili Ideologi Pancasila sesuai dengan saya	6.8%
Tertarik dengan figur caleg-caleg partai	6.2%
Tertarik figur ketua partai	4.2%
Tertarik program partai	3.7%
Visi misi sangat mewakili semangat generasi milenial	3.6%
Mewakili aspirasi kalangan/ormas tertentu	1.8%
Tertarik slogan/tagline partai	0.4%
Lainnya	0.4%
TT/TJ	27.7%

Sumber: Lembaga Survey Charta Politika Tahun 2019

Pada Pemilu legislatif pun jawaban responden paling banyak atas pertanyaan alasan memilih partai politik karena partai tersebut mengusung calon presiden dan wakil presiden yang mereka pilih. Berdasarkan data Pemilu tahun 2019, di Kecamatan Magelang Utara pada pemilihan presiden dan wakil presiden, jumlah suara yang diperoleh oleh paslon Joko Widodo-Ma'rif Amin sebesar 14.406

suara dan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 9.643 suara. Kemudian, pada pemilihan anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, jumlah suara yang diperoleh oleh partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 13.455 dan jumlah suara yang diperoleh oleh partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 8.922. Data tersebut menunjukkan bahwa suara yang diperoleh oleh partai-partai pengusung dari kedua paslon presiden dan wakil presiden tidak berbeda jauh dari suara yang diperoleh masing-masing paslon, Angka yang tidak jauh berbeda tersebut tentu bukan sesuatu yang tanpa sebab. Pada penyelenggaraan Pemilu serentak, menurut Mukhtarrija (2017) terdapat kecenderungan bagi pemilih untuk memilih partai atau koalisi partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden pilihannya. Dengan kata lain pilihan calon presiden dan wakil presiden memiliki pengaruh terhadap preferensi memilih partai politik. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi preferensi memilih (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012) yaitu: (1) Aspek Sosiologis, preferensi memilih seseorang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada; (2) Aspek Psikologis, preferensi memilih seseorang cenderung dipengaruhi oleh penilaian terhadap figur seorang kandidat/calon, isu-isu yang diangkat, dan identifikasi mereka terhadap partai; (3) Aspek Pilihan Rasional, preferensi memilih cenderung dipengaruhi oleh perhitungan mengenai keuntungan yang diperoleh dari keputusan yang diambil.

Dengan diselenggarakannya pemilu serentak ini penting adanya suatu kajian yang meneliti apakah terdapat kaitan antara popularitas calon presiden dan wakil presiden yang dapat memberikan Efek Ekor Jas atau *Coattail Effect* terhadap

penyelenggaraan pemilu sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan. Penelitian ini akan membatasi fokus kajian pada 2 (dua) isu, yakni tingkat kehadiran pemilih di TPS dan preferensi memilih.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Popularitas Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Kehadiran Dan Preferensi Memilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang?; dan
2. Bagaimana pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap preferensi memilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh antara popularitas yang dimiliki calon presiden dan wakil presiden dengan tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; dan

2. Untuk membuktikan seberapa besar pengaruh antara popularitas yang dimiliki calon presiden dan wakil presiden dengan preferensi memilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan mampu memberi manfaat untuk banyak pihak, diantaranya:

1.4.1. Peneliti

Diharapkan mampu memberi tambahan wawasan mengenai pengaruh popularitas calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dan preferensi pemilih terutama di Kecamatan Magelang Utara sehingga mengetahui seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden.

1.4.2. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat sehingga mampu menelaah secara kritis mengenai pengaruh yang diberikan oleh popularitas calon presiden dan wakil presiden pada penyelenggaraan Pemilu.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Pemilu Serentak (Concurrent Elections)

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tertian

dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017. Kemudian, menurut pasal 347 ayat 1 di undang-undang yang sama menyatakan pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Pemilu serentak adalah sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Geys, 2006). Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal (Haris, 2016:14). Proses penyelenggaraan pemilu serentak di berbagai negara memiliki model dan ciri masing-masing. Di setiap model tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah beberapa model pemilu serentak (Haris, 2016:24):

1. Pemilu secara serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Kelebihan dari sistem ini adalah Pemilu di semua tingkat pemerintahan dilaksanakan sekali dalam kurun waktu lima tahun. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ini, diantaranya yaitu; (a) pemilih akan mengalami kesulitan untuk mengenal dan menentukan pilihannya dari begitu banyak nama calon; (b) kertas suara akan sangat tebal dan/atau lebar; (c) persiapan logistik sangat rumit; (d) perhitungan suara membutuhkan waktu lama.
2. Model *Clustered concurrent elections* adalah sistem pemilu serentak yang mendahulukan Pemilu legislatif di semua tingkat pemerintahan dan kemudian selang beberapa bulan disusul oleh Pemilu Eksekutif di semua tingkat pemerintahan. Kelebihannya adalah pemilih mampu memahami pemisahan

Pemilu legislatif dan eksekutif. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu: (a) pemilih sulit membedakan para calon anggota legislatif di berbagai tingkat pemerintahan; (b) kendala sulitnya penyediaan dan pengiriman logistik; (c) surat suara akan sangat tebal dan/atau lebar; (d) perhitungan suara membutuhkan waktu lama dan rumit.

3. Model *concurrent election with mid-term elections* adalah sistem penyelenggaraan Pemilu serentak Pemilu tingkat pusat/nasional yang kemudian dengan jeda waktu sekitar 2,5 tahun diselenggarakan Pemilu tingkat daerah. Kelebihan dari model ini adalah hasil Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif saling terkait serta timbul keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
4. Model *concurrent election with regional-based concurrent elections* adalah sistem Pemilu serentak yang membagi pelaksanaan Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif pada tingkat pusat kemudian disusul dengan selang 1 tahun pelaksanaan Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif di tingkat provinsi serta selang 1 tahun kemudian dilaksanakan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
5. Model *concurrent national election with flexible concurrent local elections at provincial levels* adalah sistem Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tingkat pusat kemudian disusul oleh Pemilu serentak di tingkat provinsi. Kelemahan dari model ini adalah siklus Pemilu lokal disesuaikan dengan jadwal masing-masing provinsi, sehingga intensitas Pemilu, khususnya Pemilu lokal masih relatif tinggi.

6. Model Pemilu serentak yang dilaksanakan untuk memilih anggota eksekutif pusat, legislatif pusat, dan daerah. Kemudian diikuti oleh Pemilu eksekutif pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk satu provinsi, Pemilu ini bertujuan untuk memilih kepala daerah di tiap tingkatannya.

1.5.2. Efek Ekor Jas (*Coattail Effect*)

coattail effect adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan), calon pemimpin yang diusung memiliki efek ekor jas terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung (Yunus, 2018). Menurut teori *coattail effect* terdapat kecenderungan bagi pemilih untuk memilih partai atau koalisi partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden pilihannya (Mukhtarrija et al., 2017).

Coattail effect tidak terlepas dari diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif. Efek tersebut terjadi disaat pemilih memilih secara berurutan dan disaat pemilu diselenggarakan serentak lebih banyak pemilih yang memutuskan kandidat lokal terlebih dahulu sebelum memilih daftar partai (Rheault et al., 2020). Apabila pemilih memilih calon anggota legislatif yang mengusung calon presiden dan wakil presiden yang dipilih maka disaat mereka terpilih akan mengakibatkan sinergitas antara eksekutif dan anggota dewan di parlemen nantinya (Haris, 2016).

1.5.3. Popularitas Calon

Popularitas berasal dari kata populer yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah disukai atau dikagumi banyak orang. Dalam konteks Pemilu, popularitas adalah sejauh mana publik mengenal seseorang yang terlibat dalam

kontes suksesi kekuasaan politik (Putri & Muradi, 2017). Kepopuleran seseorang menjadi faktor penting untuk maju dalam kontestasi Pemilu. Popularitas mendorong pemahaman pemilih untuk dapat melihat kepantasan dari seorang calon/kandidat menjadi perwakilan publik. Semakin populer kandidat/calon yang maju maka akan semakin meningkatkan pemahaman pemilih terhadap kandidat/calon tersebut. Apabila masyarakat menilai bahwa calon/kandidat yang maju memadai, maka akan meningkatkan nilai elektabilitasnya dan pemilih akan terdorong untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada hari H pemilihan (Tavits, 2009). Dorongan ini muncul karena keinginan untuk merebut kemenangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung (Sardini & Erowati, 2020).

Berbagai upaya perlu dilakukan guna meningkatkan popularitas kandidat/calon yang maju diantaranya dengan menggunakan media massa seperti televisi dan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Di era modernisasi, kampanye politik di Indonesia pasca Orde Baru, media massa memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih (Utomo, 2013). figur kandidat/calon yang maju dalam kontestasi Pemilu eksekutif menjadi faktor penting karena di media televisi maupun media sosial lebih cenderung memberitakan isu-isu atau kampanye terkait olehnya. Tingginya pemberitaan di media massa menyebabkan meningkatkan perhatian masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di lingkungannya.

1.5.4. Kehadiran Pemilih (*Voters Turnout*)

Partisipasi politik merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan. Setiap kebijakan yang diambil apabila menyangkut hajat hidup masyarakat maka mereka mempunyai hak untuk ikut dalam pembuatan keputusan. Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*) (Budiardjo, 1998).

Terdapat empat kriteria yang perlu hadir dalam partisipasi politik: (1) tindakan; (2) oleh orang biasa; (3) dilakukan secara sukarela; dan (4) untuk mempengaruhi kebijakan publik. Salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah turut serta pada pemilihan umum. Bentuk-bentuk lain dari partisipasi politik sangat banyak, seperti membantuk kegiatan partai, menyumbang dana bagi partai, menghubungi pejabat publik atau kantor pemerintahan dengan berbagai cara seperti lewat telepon, tatap muka, lewat surat; menandatangani petisi, kerja bakti di lingkungan tempat tinggal (Mujani et al., 2012).

Tingkat persentase partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator baik tidaknya pemerintahan suatu negara. Tingkat partisipasi masyarakat yang makin tinggi menunjukkan bahwa tingginya keinginan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah dan tingginya pemahaman masyarakat tentang permasalahan yang sedang terjadi. Tingkat kesadaran politik masyarakat akan hak dan kewajibannya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi partisipasi politik menurut Internasional IDEA (2016), yaitu:

1. Faktor Sosial Ekonomi

a) Jumlah Penduduk

Pada negara-negara yang memiliki populasi kecil dampak setiap suara warga negara lebih besar apabila dibandingkan dengan negara yang memiliki populasi besar dan dengan demikian maka akan lebih banyak warga negara yang turut berpartisipasi dalam Pemilu.

b) Stabilitas Populasi

Seorang warga negara yang tinggal di suatu wilayah untuk jangka waktu lama biasanya memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait isu-isu yang ada di wilayah tersebut serta lebih peduli tentang keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan alasan tersebut maka seorang warga negara akan lebih berpeluang untuk turut berpartisipasi dalam Pemilu.

c) Pembangunan Ekonomi

Pada negara-negara yang tingkat perekonomiannya belum mencapai taraf maju atau bahkan masih mengalami kesulitan, masyarakatnya cenderung apatis dan menarik diri dari politik untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

2. Faktor Politik

a) Kedekatan Pemilu

Keputusan untuk berpartisipasi dalam Pemilu dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa suara individu akan berdampak pada hasil Pemilu. Oleh sebab itu, semakin dekat pemilihan antara partai atau kandidat diharapkan, semakin tinggi kemungkinan warga negara untuk memberikan suara mereka.

b) Persepsi Tentang Isu-isu Politik

Sejauh mana isu-isu yang diangkat oleh partai politik atau kandidat berdampak pada kebijakan pemerintah. Semakin dekat isu-isu tersebut dirasakan oleh masyarakat maka akan semakin tinggi keinginan untuk berpartisipasi pada Pemilu.

c) Pengeluaran Kampanye

Besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan untuk kampanye berdampak pada penyebaran informasi politik kepada masyarakat. Sumber daya anggaran yang lebih besar memungkinkan distribusi informasi politik yang lebih luas untuk membantu masyarakat lebih mengenal tentang kandidat atau partai politik.

d) Fragmentasi Politik

Jumlah partai yang turut serta dalam Pemilu mampu mempengaruhi partisipasi pemilih. Dampak positif dari banyaknya partai politik adalah pemilih memiliki banyak pilihan partai mana sesuai dengan dirinya. Namun, terlalu banyak pilihan dapat berdampak negatif yaitu

membingungkan pemilih dan mempersulit untuk menilai mana yang sesuai dengan dirinya.

3. Faktor Kelembagaan

a) Sistem Pemilu

Pemilu yang menggunakan sistem *proportional representation* akan cenderung meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilu yang menggunakan sistem *plurality/majority*.

b) Wajib Memilih

Apabila Pemilih diberi kewajiban untuk memilih secara hukum, jumlah pemilih akan meningkat, terlebih lagi apabila warga negara yang tidak menunaikan kewajibannya akan diberi hukuman.

c) Pemilihan Serentak

Ketika beberapa pemilihan diselenggarakan pada hari yang sama, tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi. Hal tersebut karena pemilih akan termotivasi untuk memberikan suaranya setidaknya dalam satu pemilihan.

d) Persyaratan Pendaftaran

Adanya persyaratan pendaftaran perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilu menimbulkan beban bagi pemilih, karena pendaftaran membutuhkan waktu, tenaga, dan bahkan biaya yang mengakibatkan pada tingkat pendaftaran warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

e) Pengaturan Pemungutan Suara

Rancangan jenis pengaturan pemungutan suara memiliki dampak pada partisipasi pemilih. Pengaturan tersebut berupa hari pemungutan suara

dilakukan sehari atau lebih, dilakukan pada hari libur atau hari kerja, kedekatan tempat pemungutan suara, dan prosedur pemungutan suara yang diterapkan.

4. Faktor Individu

a) Usia

Usia merupakan faktor yang mampu mempengaruhi partisipasi pemilih. Kalangan pemilih muda memiliki kecenderungan untuk apatis dalam Pemilu, sebaliknya kalangan pemilih tua memiliki kesadaran yang lebih untuk turut serta dalam Pemilu.

b) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat banyak dikaitkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilu. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dianggap mampu mempengaruhi kecenderungan untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

c) Kepentingan Politik

Kesadaran masyarakat terhadap politik mendorongnya untuk berpartisipasi pada Pemilu. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh lingkungan sekitar yang memungkinkan untuk diskusi atau debat terkait politik serta pendidikan kewarganegaraan yang diterima di sekolah.

d) Tugas Sipil

Pada masyarakat yang menganggap berpartisipasi pada Pemilu merupakan kewajiban dan tugas mereka untuk berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan politik maka tingkat partisipasi cenderung meningkat.

1.5.5. Preferensi Memilih

Preferensi memilih dalam politik memiliki arti kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihannya dalam pelaksanaan pemilu. Preferensi memilih merupakan salah satu indikator perilaku yang bisa dibentuk oleh kampanye politik jangka panjang. Menurut Mujani, Liddle, dan Ambardi (2012) Pembentukan indikator perilaku politik ini dapat dilihat dari model pendekatan:

1. Model Sosiologis

Model pendekatan sosiologis memiliki asumsi bahwa setiap individu memiliki keterkaitan pada berbagai lingkungan sosial yang dimilikinya, seperti lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat kerja, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga dirinya dapat diterima oleh orang lain di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan preferensi memilih, model sosiologis ini menganggap bahwa memilih bukan sepenuhnya pengalaman pribadi. Perilaku memilih cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana dia berada, sehingga memilih dianggap sebagai bentuk pengalaman kelompok.

Terdapat faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pilihan pemilih dalam Pemilu yaitu faktor kelas sosial diantaranya: (1) pendidikan, masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa hasil pemilu nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik akan turut serta dalam Pemilu karena mengerti pentingnya hal tersebut untuk semua warga; (2) status pekerjaan, seseorang yang memiliki pekerjaan cenderung lebih mungkin berpartisipasi dalam Pemilu dibandingkan dengan seseorang yang belum memiliki pekerjaan karena

mereka lebih fokus pada upaya untuk mendapatkan pekerjaan; (3) tingkat pendapatan, seseorang yang memiliki pendapatan yang baik memiliki kesempatan untuk mendapat akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, oleh karena itu mereka cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (4) Organisasi atau jaringan, orang yang aktif ikut dalam organisasi akan mendapatkan pengaruh informasi dari lingkungan sekitarnya sehingga memiliki kecenderungan untuk terlibat dengan urusan publik. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah organisasi atau jaringan primordial seperti agama dan kedaerahan, organisasi atau jaringan kepentingan seperti organisasi buruh, petani, atau profesi lainnya, serta asosiasi volutaristik lain seperti klub-klub olahraga dan seni budaya.

2. Model Psikologis

Menurut model ini motivasi warga untuk ikut andil dalam Pemilu bukan hanya karena mereka memiliki kondisi sosial-ekonomi yang baik atau berada dalam jaringan sosial, melainkan karena mereka memiliki ketertarikan terhadap politik dan mempunyai sumber informasi guna menentukan pilihannya. Mereka percaya pilihannya dapat ikut memperbaiki kondisi. Seorang berpartisipasi dalam pemilu karena ia ingin berpartisipasi. Terdapat tiga indikator dalam pendekatan psikologis yaitu: persepsi dan penilaian terhadap seorang calon/kandidat; persepsi dan penilaian terkait isu/tema yang diangkat; dan identifikasi seseorang terhadap suatu partai.

Isu-isu atau tema yang diangkat dapat menjadi faktor penting dalam pendekatan psikologis apabila (1) isu/tema yang diangkat diterima oleh pemilih; (2)

isu/tema yang diangkat dianggap penting dan berpengaruh; (3) Pemilih mampu menempatkan diri terhadap isu/tema yang diangkat, baik itu positif atau negatif. Terdapat 2 klasifikasi isu dalam studi Pemilu yaitu: (1) *Position issues*, adalah antar partai/kelompok memiliki tujuan masing-masing yang bukan hanya berbeda namun tujuannya bertentangan; (2) *Valence issues*, adalah isu terkait cara suatu partai/kelompok untuk mencapai tujuan. Contohnya semua partai di Indonesia tentu sepakat untuk memajukan Indonesia namun masing-masing partai tentu punya pandangan dan cara masing-masing untuk mencapai kemajuan.

3. Model Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Menurut pandangan teori pilihan rasional, hasil pemilu adalah barang publik, yakni siapa pun yang menjadi pemimpin atau kebijakan publik apa pun yang akan dibuat, tidak seorang pun yang akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapa pun sumbangsihnya bagi pembentukan barang publik tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, seorang warga akan mencari cara untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal, sehingga preferensi pemilih dapat diukur menggunakan pendekatan ilmu ekonomi. Pemilu diibaratkan sebagai suatu pasar yang terdapat penawaran yaitu partai dan permintaan yaitu pemilih. Dalam konteks Pemilu, teori ini mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk memilih tergantung pada keuntungan apa yang akan dia peroleh dari keputusan yang diambil.

Terdapat lima kriteria untuk mengetahui suatu keputusan termasuk pilihan rasional atau tidak, yakni: (a) Serangkaian pilihan alternatif yang membantu individu untuk membuat keputusan; (b) individu mampu mengidentifikasi

preferensinya dengan opsi-opsi pilihan yang ada secara runtut; (c) Susunan preferensi tersebut bersifat transitif; (d) alternatif yang dipilih adalah alternatif yang dirasa paling dekat (utama); dan (e) Individu akan membuat keputusan yang sama apabila dihadapkan pada berbagai pilihan dalam kurun waktu yang berbeda di lingkungan yang sama.

1.6. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang ditetapkan terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol yang dinyatakan dalam kalimat negatif (Sugiyono, 2012). Berikut penjelasannya:

Hipotesis nol (H_0)

$$H_0 : \rho = 0$$

= 0 berarti tidak ada pengaruh

ρ = nilai koefisien regresi

1. Tidak ada pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
2. Tidak ada pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap preferensi memilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Hipotesis alternatif (Ha)

$$H_0 : \rho \neq 0$$

$\neq 0$ berarti ada pengaruh

ρ = nilai koefisien regresi

1. Terdapat pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
2. Terdapat pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap preferensi memilih dalam Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

1.7. Definisi Konsep

Untuk memberikan fokus arahan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan penegasan definisi konsep yang akan digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Figur calon presiden dan wakil presiden memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu serentak dan memunculkan *coattail effect*. Efek dari *coattail effect* hanya terjadi disaat pemilih memilih secara berurutan dan disaat pemilu diselenggarakan serentak lebih banyak pemilih yang memutuskan kandidat lokal terlebih dahulu sebelum memilih daftar partai.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan

oleh pemerintah. Salah satu wujud partisipasi politik adalah datang dalam pemungutan suara pemilu.

3. Preferensi memilih dalam politik memiliki arti kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihannya dalam pelaksanaan pemilu.

1.8. Definisi Operasional

Definisi konsep yang telah disusun kemudian dijabarkan kedalam definisi operasional. Konsep dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang akan menjadi landasan dalam penyusunan daftar pertanyaan penelitian, sebagaimana disusun pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Definisi Operasional

No.	Variabel	Konsep dalam Politik	Indikator
X¹	Efek dari <i>coattail effect</i> hanya terjadi disaat pemilih memilih secara berurutan dan disaat pemilu diselenggarakan serentak lebih banyak pemilih yang memutuskan kandidat lokal terlebih dahulu sebelum memilih daftar partai. Tingkat kepopuleran calon presiden dan wakil presiden berperan penting dalam munculnya <i>coattail effect</i> .	- tingkat keterkenalan pasangan capres dan cawapres - elektabilitas pasangan capres dan cawapres - peserta Pemilu	- tingkat pemberitaan media sosial terhadap kedua paslon - tingkat pemberitaan media televisi terhadap kedua paslon - tingkat perbincangan masyarakat terhadap kedua paslon
Y¹	Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud	- Wujud implementasi demokrasi dalam	- Persepsi masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu Serentak

	untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Salah satu wujud partisipasi politik adalah datang dalam pemungutan suara pemilu.	hal pemilihan umum - dilakukan secara individu maupun kolektif atau bersama-sama	-Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi - Persepsi masyarakat mengenai berpartisipasi dalam Pemilu
Y²	Preferensi memilih adalah suatu kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan.	- Perilaku pemilih - Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih	- Faktor pendekatan sosiologis dalam mempengaruhi pilihan - Faktor pendekatan psikologis dalam mempengaruhi pilihan - Faktor pendekatan pilihan rasional dalam mempengaruhi pilihan

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Sebuah penelitian diawali dari pertanyaan yang harus dijawab atau masalah yang perlu untuk dipecahkan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu mengidentifikasi tujuan dan sasaran penelitian. Berdasarkan hasil perumusan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti terkait pengaruh popularitas calon presiden dan wakil presiden terhadap kehadiran dan preferensi memilih pada Pemilu tahun 2019 maka dalam proses penelitian ini digunakan tipe penelitian kuantitatif explanatori. Tujuan utama dari penelitian eksplanatori adalah untuk

mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dan mencoba memahami bagaimana variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sue & Ritter, 2015).

1.9.2. Populasi dan Sampel

1.9.2.1. Populasi

Populasi adalah semua individu atau objek dengan karakteristik yang sama (Polit & Beck, 2014). Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Magelang Utara yang telah ditetapkan oleh KPU masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 yaitu sejumlah 27.986 orang.

1.9.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk menjadi subjek penelitian (Polit & Beck, 2014). Digunakan untuk mempermudah pengambilan data karena populasi yang begitu besar dan dinilai mampu menjadi perwakilan dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Magelang Utara yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kecamatan Magelang Utara

No.	Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1.	Kedungsari	5.387 jiwa
2.	Kramat Selatan	6.144 jiwa
3.	Kramat Utara	3.624 jiwa
4.	Potrobangsari	6.327 jiwa
5.	Wates	6.502 jiwa
Jumlah		27.984 jiwa

Sumber: KPU Kota Magelang Tahun 2019

Rumus perhitungan sampel yang digunakan adalah rumus perhitungan sampel Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi error (10% atau 0,10)

$$n = \frac{27.984}{1 + (27.984 \times 0,10 \times 0,10)}$$

$$n = \frac{27.984}{1 + 279,84}$$

$$n = \frac{27.984}{280,84}$$

$$n = 99,643$$

Berdasarkan rumus Slovin, maka diperoleh hasil sampel sebanyak 99,643 dan dibulatkan menjadi 100 sampel. Dengan demikian pada penelitian mengenai “Pengaruh Popularitas Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Kehadiran dan Preferensi memilih dalam Pemilu Tahun 2019” ini untuk mewakili seluruh populasi yang ada responden yang dibutuhkan yaitu 100 responden. Setelah menentukan jumlah sampel, Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Magelang Utara dengan Teknik *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan bila suatu populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Wiratna, 2019:14). Untuk memperoleh sampel yang sesuai dilakukan dengan cara berikut:

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Populasi I}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total Sampel}$$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka perhitungan sampel per kelurahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sampel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019
Kecamatan Magelang Utara

No	Kelurahan	Perhitungan Sampel	Sampel DPT
1.	Kedungsari	$\frac{5.387}{27.984} \times 100$	19 jiwa
2.	Kramat Selatan	$\frac{6.144}{27.984} \times 100$	22 jiwa
3.	Kramat Utara	$\frac{3.624}{27.984} \times 100$	13 jiwa
4.	Potrobangsari	$\frac{6.327}{27.984} \times 100$	23 jiwa
5.	Wates	$\frac{6.502}{27.984} \times 100$	23 jiwa
	Jumlah		100 jiwa

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2019

1.9.3. Sumber Data

Terdapat 2 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penyebaran secara langsung angket atau kuesioner yang disusun oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca buku-buku literatur, dokumen yang dianggap penting dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.9.4. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert. Skala likert merupakan skala yang mana pertanyaan-pertanyaan dibuat untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden (Wiratna, 2019:5). Opsi jawaban yang ada memiliki skala 1-5.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Kuesioner atau angket

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner berisi daftar pertanyaan kepada responden untuk kemudian dijawab. Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup.

1.9.6. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahap pengolahan data, yaitu:

1. *Editing*

Merupakan kegiatan pemeriksaan jawaban responden dari kuesioner yang telah disebarkan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa responden telah memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang telah diberikan dan tidak terjadi kesalahan pengisian.

2. *Coding*

Merupakan kegiatan untuk memberikan kode atau bobot nilai pada jawaban responden di setiap butir pertanyaannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data. Dilakukan dengan menyusun tabulasi

data yang berisi daftar skor dari data diri dan jawaban responden pada tiap pertanyaan dan total skor tiap variabel pertanyaan.

3. Tabulasi

Merupakan kegiatan untuk menyusun data ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut tersebut kemudian diuji dan dianalisis untuk mendapat temuan dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian untuk kemudian data tersebut dihitung untuk menguji hipotesis yang telah diajukan serta dianalisis guna menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2012). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan dibantu menggunakan program *software Statistical Packages for the Social Science* (SPSS). Berikut penjelasannya:

1.9.7.1. Uji Validitas

Sebelum melakukan analisis data, item pertanyaan dari kuesioner perlu diuji validitasnya, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kevalidan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Wiratna, 2019:67). Validitas diukur dengan nilai r , dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ = item pertanyaan valid
- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ = item pertanyaan tidak valid
- $r \text{ tabel}$ dihitung dengan rumus $df = n-2$ dengan sig 0,05 (5%)

1.9.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner (Wiratna, 2019:68). Adapun cara mengukur reliabilitas yaitu melihat koefisien alpha cronbach's dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika alpha cronbach $> 0,60$ maka reliabel
- Jika alpha cronbach $< 0,60$ maka tidak reliabel

1.9.7.3. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah disusun. Bentuk dari persamaan regresi linier sederhana yakni:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen
- a = Harga Y bila $X=0$ (harga konstan)
- b = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka ataupun penurunan variabel independen ataupun variabel dependen
- x = Variabel independen

Sebelum melakukan uji regresi linier sederhana, data yang sudah diambil harus dilakukan uji 2 asumsi klasik (Wiratna, 2019:165), yaitu:

1. Asumsi Normalitas, adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah residual variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya dilakukan pengujian menggunakan uji *kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan berikut ini:

- Jika $\text{Sig} > 0,05$ (5%) maka data berdistribusi normal
- Jika $\text{Sig} < 0,05$ (5%) maka data tidak berdistribusi normal

2. Asumsi Heteroskedastisitas, adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Untuk mengetahuinya dilakukan pengujian menggunakan uji glejser dengan ketentuan berikut ini:

- Jika $\text{Sig} > 0,05$ (5%) maka model regresi tidak mengandung heterokedastisitas
- Jika $\text{Sig} < 0,05$ (5%) maka model regresi mengandung heteroskedastisitas

1.9.7.4. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Digunakan untuk menguji apakah satu variabel independen dapat berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahuinya adalah dengan melihat nilai T hitung dan nilai signifikansi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- Jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Selain itu, untuk melihat ada tidaknya pengaruh dapat melihat dari nilai signifikansi dengan ketentuan:

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ (5%), maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ (5%), maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Berikut adalah Langkah-langkah uji T yang digunakan pada penelitian ini:

1. Perumusan Hipotesis

- H_0 : Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dan preferensi memilih di Kota Magelang pada Pemilu Tahun 2019;
- H_a : Diduga bahwa terdapat pengaruh popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap tingkat kehadiran pemilih dan preferensi memilih di Kota Magelang pada Pemilu Tahun 2019

2. Kriteria keputusan pengujian

- Apabila nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya bahwa popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki pengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih dan preferensi memilih di Kota Magelang pada Pemilu Tahun 2019 secara signifikan;
- Apabila nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya bahwa popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih dan preferensi memilih di Kota Magelang pada Pemilu Tahun 2019.

1.9.7.5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui tingkat kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasinya. Untuk mengetahui persentase kontribusi tersebut menggunakan rumus:

$$R = r^2 \times 100\%$$